

# KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PEKERJAAN RUMAH (PR) DITINGKAT SEKOLAH DASAR (Studi Pada Sekolah Dasar Islam Saroja Surabaya)

**Muchamad Rizqi<sup>1</sup>, Dida Rahmadanik<sup>2</sup>**

Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>1</sup>,  
Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>2</sup>  
[muchamadrizqi@untag-sby.ac.id](mailto:muchamadrizqi@untag-sby.ac.id)  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

## ABSTRAK

Penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta di Kota Surabaya yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Surabaya tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Pahlawan ini. Pendalaman karakter siswa, inilah yang menjadi pijakan bagi Eri Cahyadi dalam mengeluarkan kebijakan baru ini. Dalam menjalankan kebijakan tersebut diperlukan komunikasi, hal ini menjadi sangat relevan sebagai salah satu strategi untuk mendukung tujuan penerapan kebijakan ini. Advokasi fokus pada para pengambil keputusan atau pemimpin masyarakat, komunikasi umumnya menargetkan individu atau kelompok di masyarakat, dan mobilisasi sosial bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dan komunitas tertentu. Dengan adanya program tanpa PR bagi siswa sekolah dasar di SD Saroja Karakter anak akan terbentuk nanti karena anak butuh kasih sayang orangtua. Yang menjadikan anak ini pemimpin yang luar biasa adalah kasih sayang orangtua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan sangat penting diterapkan untuk sebuah kebijakan yang melibatkan lintas sektoral.

**Kata Kunci:** *Komunikasi, Kebijakan, Pekerjaan Rumah, Siswa.*

## ABSTRACT

*The elimination of homework (PR) for students of public and private elementary schools (SD) and junior high schools (SMP) in Surabaya City which was initiated by the Surabaya City Government does not seem to be a burden on the palm of the hand. The policy issued by the Mayor of Surabaya, Eri Cahyadi reaped pros and cons among the people of the City of Heroes. Deepening character, this is the basis for students for Eri Cahyadi in issuing this new policy. In carrying out this policy, communication is needed, this is very relevant as one of the strategies to support the objectives of implementing this policy. Advocacy focuses on decision makers or community leaders, communication generally targets individuals or groups within society, and social mobilization aims to gain support from the wider community and specific communities. With the program without homework for elementary school students at SD Saroja, children's character will be formed later because children need parental love. What makes this child an excellent leader is parental love. This study uses a qualitative method with a case study approach. The research results show that policy communication is very important for a policy that involves cross-sectoral involvement.*

**Keywords:** *Communication, Policy, Homework, Students.*

## 1. LATAR BELAKANG

Penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta di Kota Surabaya yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Surabaya tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Pahlawan ini. Pendalaman karakter siswa, inilah yang menjadi pijakan bagi Eri Cahyadi dalam mengeluarkan kebijakan baru ini.

Skema yang diterapkan dalam kebijakan tersebut adalah memangkas jam pelajaran di sekolah hingga pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerapkan dua jam pembelajaran mulai pukul 13.00 - 14.00 WIB yang digunakan untuk pendalaman karakter siswa. Seperti dilansir dari laman resmi Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak para orang tua siswa untuk ikut membentuk karakter anak-anak saat berada di rumah dengan alasan orang tua juga memiliki tugas dalam pengawasan dan menjaga anak-anak selama berada di rumah.

Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi tak menampik jika ada orang tua siswa yang khawatir dengan kebijakan pembebasan PR tersebut. Namun, ia menilai bahwa pro dan kontra tersebut merupakan hal yang wajar. “Sebetulnya orang tua belum memahami kalau PR itu (tetap) ada tetapi diganti dengan PR untuk pembentukan karakter di sekolah. Berarti orang tua harus sadar betul, ketika anaknya di sekolah mendapatkan pendidikan, ada PR setelah itu diselesaikan di sekolah,” jelas dia. (*sumber: <https://www.surabaya.go.id/>*)

Alasan lain penghapusan PR, diantaranya adalah kekhawatiran akan munculnya masalah psikologis pada anak akibat beban tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, memicu sikap individualistis, serta untuk menutup kesenjangan tatap muka selama pandemi Covid-19. (*sumber: Jawa Pos edisi Rabu, 9 November 2022, hal 13*)

Berdasarkan fenomena tersebut, wajar apabila muncul kekhawatiran di kalangan wali murid mengingat PR merupakan alat kontrol bagi orang tua ketika anak-anak mereka berada di rumah terutama bagi para orang tua yang bekerja di malam hari. Apa yang dikhawatirkan oleh para orang tua ini sebenarnya cukup beralasan, bagi mereka PR merupakan “alat kendali” yang dirasa cukup baik dalam mengontrol aktivitas anak-anak mereka ketika berada di rumah.

Penghapusan PR memang menjadi problem ketika kita harus berbicara mengenai tanggungjawab dan pengendalian perilaku anak-anak. Pada dasarnya PR yang diberikan oleh sekolah memiliki tujuan untuk melatih tanggung jawab siswa. Namun, pertanyaan yang muncul akibat penerapan kebijakan ini apakah siswa tetap dapat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan tentunya langkah apa yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk mengontrol anak-anaknya ketika di rumah?

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan bahwa pola pembelajaran pendalaman karakter, seperti menari, melukis, mengaji, dan sebagainya ini akan melatih para siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan berani memberikan pendapat untuk menciptakan desain atau rencana pengembangan pengetahuan siswa. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang kreatif kepada anak. Hal ini dilakukan agar para siswa tidak terbebani PR, serta meningkatkan kemampuan siswa untuk bersosialisasi.

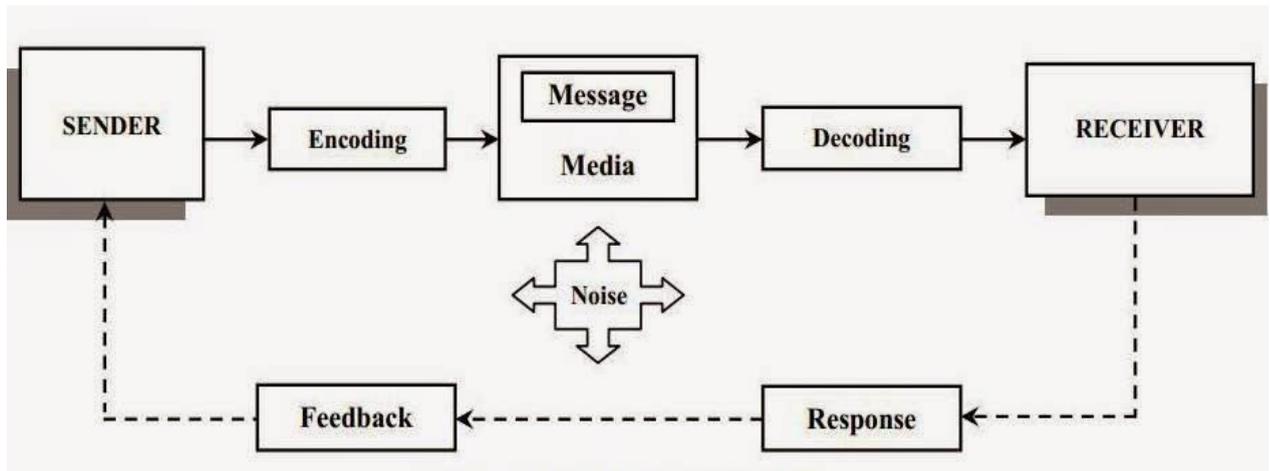
Terlepas dari itu semua, yang diperlukan oleh masyarakat pada saat ini adalah pemahaman mengenai kebijakan baru ini. Pemerintah Kota Surabaya tentunya harus menyediakan saluran- saluran komunikasi guna menyamakan persepsi sehingga kebijakan ini tetap dapat dilaksanakan. Melihat latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:” Bagaimana Komunikasi Kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (PR) ditingkat sekolah dasar (studi pada Sekolah Dasar Islam Saroja Surabaya)? dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis komunikasi kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (PR) ditingkat sekolah dasar (studi pada Sekolah Dasar Islam Saroja Surabaya).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses yang terjadi diantara satu orang dengan orang lainnya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan, yakni mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya yang menjadi sasaran komunikasi. (Hovland, Janis, and Kelley. 1995).

*Communication in Society*, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses “siapa” mengatakan “apa” dengan menggunakan “saluran apa” atau “hasil apa” atau yang lebih dikenal dengan *who says what in which channel to whom and with what effect* (Harold Laswell dalam Effendy. 2003:253)



Bagan 1. Model Proses Komunikasi Kotler (2000:551)

Komunikasi memiliki lima unsur utama yang tidak dapat dipisahkan, yakni *sender*

(komunikator), pesan, media, *receiver* (komunikasi), dan efek.

*Sender* (komunikator) memegang peran sentral yang menentukan keberhasilan dari sebuah proses pertukaran pesan. Akibatnya, komunikator harus memiliki kemampuan untuk memahami siapa yang menjadi targetnya sehingga dapat menentukan bentuk (primer/sekunder) dan jenis pesan (verbal/non verbal) yang disampaikan (encoding) kepada komunikannya.

Selain itu, komunikator harus dapat menentukan media yang tepat sehingga pesan yang didistribusikan dapat diterima dengan baik oleh komunikasi.

Secara sederhana komunikasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan. Dikatakan sebagai proses karena ada aktivitas yang melibatkan peranan banyak elemen atau tahapan yang meskipun terpisah-pisah di mana semua tahapan ini saling terkait sepanjang waktu sebagaimana dalam percakapan yang sederhana yang selalu ada langkah seperti penciptaan pesan, pengiriman, penerimaan, dan interpretasi terhadap pesan (Liliweri, 2011: 34). Selain itu, Jhon B. Hoben, berasumsi bahwa komunikasi (harus) berhasil: "Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan." Asumsi di balik definisi tersebut adalah bahwa suatu pikiran atau gagasan secara berhasil dipertukarkan (Mulyana, 2010: 61).

## **Komunikasi Kebijakan.**

Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan. Mengomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar menyosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan.

Sebuah kebijakan publik akan berjalan efektif apabila publik menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan itu sendiri. Publik perlu didengar pendapat mereka sejak kebijakan disusun atau direncanakan. Proses pelibatan publik sedari awal kebijakan disusun merupakan bagian dari mengomunikasikan kebijakan. Komunikasi kebijakan kepada publik membutuhkan waktu dan cara-cara yang efisien. Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2007:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan pengelompokan data primer dan data skunder. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dengan cara atau pengamatan berperan serta (*participant observation*) sebagai teknik utama, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan penggunaan dokumentasi (*documentation*). Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dilakukan dengan mengungkapkan fakta secara

terbuka dari data yang didapat atas dasar pengamatan dilapangan.

#### **4. HASIL TEMUAN**

SD Islam saraja merupakan sekolah dasar berbasis ke Islaman dimana sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta yang baik yang berada di kota Surabaya. Sekolah ini beralamat di jalan Kutisari Utara 1/15 Surabaya. Sekolah ini merupakan sekolah dasar islam terpadu dimana murid akan sekolah satu hari atau yang biasa disebut full day. Dengan prinsip belajar sehari penuh maka sekolah menerapkan tidak ada lagi pekerjaan rumah (PR) yang akan dibawa oleh siswa.

Hal ini senada dengan himbauan Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya, yang menyatakan bahwa: “Sebetulnya PR itu jangan membebani anak - anak, tapi yang saya rubah PR itu adalah untuk kegiatan pembentukan karakter. Saya harap meskipun ada PR tapi tidak terlalu berat dan terlalu banyak, yang penting adalah pertumbuhan karakter mereka,” kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam sebuah wawancara,

Mengenai jam sekolah yang terlalu panjang dan membuat aktivitas sosial di luar sekolah berkurang, pihak Sekolah SD saraja serius untuk mengurangi beban siswa. Sesuai instruksi dari wali Kota. Hal ini seperti disampaikan kepala Sekolah SDI Saroja Surabaya:

“Jam belajar selesai pukul 12.00 WIB dan pendalaman sampai pukul 14.00 WIB. Artinya dua jam sudah efektif, anak - anak bisa mengikuti pola pembelajaran melalui pengembangan bakat masing - masing. Ada lukis, menari, mengaji, dan lainnya,” kata Yusuf.

## 5. PEMBAHASAN

Perlunya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif karena membangun kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kebijakan termasuk yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Faktor penentu lain adalah ketepatan Pemerintah Kota Surabaya dalam menentukan media perantara dalam menyampaikan pesan. Pemerintah Kota Surabaya dapat menstimulasi peliputan media secara luas untuk membentuk opini dan dukungan semua pemangku kepentingan maupun publik. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang sedang berkembang saat ini dapat pula dijadikan sebagai peluang untuk mengedukasi publik dan meningkatkan literasi kebijakan.

Saat ini masyarakat Indonesia tengah mengalami peningkatan potensi literasi digital. Potensi inilah yang dapat dimaksimalkan sehingga diharapkan mampu meningkatkan digital *policy literacy*. Dengan kata lain, selain menggunakan media massa konvensional (media mainstream) Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan media-media baru.

Istilah media baru melambangkan konvergensi di dalam komunikasi massa di mana terdapat kombinasi antara media digital dan teknologi informasi, jaringan dan praktik, media dan informasi. Kombinasi ketiga hal tersebut terus mengalami perkembangan sehingga dapat dibayangkan saat ini situasi jagad media sangat dinamis dan semakin menantang. Jika sebelumnya pesan mengalir dari media kepada khalayak secara linear, maka sekarang aliran komunikasi tidak lagi linear. Media baru inilah yang memungkinkan interaksi para pemakainya.

Tidak dapat dipungkiri gambaran kondisi hubungan komunikasi pemerintah dan masyarakat pada saat ini, publik yang masih terfragmentasi, kurang memanfaatkan komunikasi digital, kurang mampu meningkatkan partisipasi publik, dan kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Pola komunikasi yang dilakukan di sini masih cenderung menggunakan model two-way asymmetrical di mana Pemerintah Kota Surabaya telah menggunakan komunikasi dua arah dengan melibatkan publik, namun di sini komunikasi yang terjadi tidak seimbang. Model ini menerapkan metode riset ilmu sosial

untuk meningkatkan efektivitas pengaruh pesan yang disampaikan dalam hal ini pemerintah masih tertarik mengenai bagaimana publik menyesuaikan diri dengan mereka daripada organisasi yang menyesuaikan dengan kepentingan publik.

Kebijakan penghapusan PR bagi pelajar SD dan SMP di Surabaya, yang juga di terapkan di SD Islam Saroja, mendapatkan respons positif oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

"Tidak perlu ada PR rutin, seperti tugas dari LKS (Lembar Kerja Siswa). Itu akan sangat mengambil waktu. Karena PR merupakan bagian dari project, kalau tidak ambil ekstrakurikuler, mereka pasti senang," kata Nadiem dalam wawancara.

Menurut Nadiem, PR yang diberikan kepada siswa seharusnya tidak bersifat memberatkan, seperti untuk meningkatkan kapasitas membaca. Kebijakan tanpa adanya pekerjaan rumah akan menumbuhkan karakter anak tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tapi yang lebih penting adalah tanggung jawab orangtua. Jangan anak dibebankan dengan PR karena orangtua tidak mampu mendidik, tetapi mereka harus hadir agar anak tidak individualis.

## 6. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa komunikasi menjadi sangat relevan sebagai salah satu strategi untuk mendukung tujuan penerapan kebijakan ini. Advokasi fokus pada para pengambil keputusan atau pemimpin masyarakat, komunikasi umumnya menargetkan individu atau kelompok di masyarakat, dan mobilisasi sosial bertujuan untuk untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dan komunitas tertentu. Dengan adanya program tanpa PR bagi siswa sekolah dasar di SD Saroja Karakter anak akan terbentuk nanti karena anak butuh kasih sayang orangtua. Yang menjadikan anak ini pemimpin yang luar biasa adalah kasih sayang orangtua.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Reina Hapsari dan Rahman, Amni Zarkasyi. 2019. *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang*. Interaksi: jurnal Ilmu Komunikasi UNDIP. Vol 8 No 2.
- Agustina, D. (2020). *Analisis kebijakan pelayanan kesehatan*. 1–64.
- Amir, A., & Noerjoedianto, D. (2017). Studi Kasus Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Promotif dan Preventif Di Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Kesmas Jambi*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v1i1.6530>
- Andhini, N. F. (2017). Advokasi Pelayanan Publik. *Journal of Chemical Information and*

*Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Anita B. (2008). *Advocacy Strategy of Health Promotion Program on Public Support and Policy in Donggala Regency Year 2008*.

Faradis, N. A., & Indarjo, S. (2018). Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 307–319. <https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.21291>

Fitriani, S. (2011). *Promosi kesehatan*. 268.

Imam, M. F., & Tauran. (2022). ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA). *Jurnal Publika*, 10(4), 1331–1346.

Iswarno, Hasanbasri, M., & Lazuardi, L. (2013). Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 02(02), 77–85. [http://jurnal.kebijakankesehatanindonesia.net/images/PDF\\_Volume/vol-2-2013/Juni\\_2013/04\\_Iswarno.pdf](http://jurnal.kebijakankesehatanindonesia.net/images/PDF_Volume/vol-2-2013/Juni_2013/04_Iswarno.pdf)

Joko, T., Haryono, S., Koesbardiati, T., Mas, S., Antropologi, D., Ilmu, F., Ilmu, S., Airlangga, U., & Surabaya, J. A. (2015). Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. *Reproduction healthservice policy for disabled females to prevent sexual abuse*. Pendahuluan Permasalahan seksualitas dan kesehatan rep. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 80–93.

Nazifah, N. (2021). Implementasi Advokasi, Komunikasi Dan Mobilisasi Sosial (Akms) Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tb Paru. *Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan*